

Kemiskinan Struktural: Fenomena Double Burden Pada Pemulung Perempuan Di Indonesia

Mutmainna ^{a,1}, Sulistyarini ^{b,2}, Amrazi Zakso ^{c,3}, Jagad Aditya Dewantara ^{c,4}

^aUniversitas Tanjungpura, Indonesia

^bmutmainna230601@gmail.com*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan pemulung perempuan Indonesia dalam menghadapi fenomena double burden yang terjadi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Batu layang. Berangkat dari teori C. Wright Mills, artikel ini membahas bagaimana kemiskinan struktural dapat mendorong terjadinya fenomena double burden. Metode kualitatif pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Dilihat dari sejarah, pemulung perempuan merupakan masyarakat pengungsi yang melakukan migrasi ke kota Pontianak dan memilih bekerja sebagai pemulung dilatarbelakangi oleh konflik etnis Madura dan melayu pada tahun 1999. Rendahnya sumber daya, tingginya tuntutan ekonomi membuat para pemulung perempuan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera sehingga mereka memutuskan berperan ganda. Kami menemukan di antara 12 pemulung perempuan hanya ada 5 pemulung saja yang mendapatkan bantuan sosial karena tidak adanya pemerataan bantuan sosial dari pemerintah, sehingga mereka belum mendapatkan hak dan keadilan. pola pikir pemulung mengenai pentingnya pendidikan saat ini sudah mulai berubah dengan bukti adanya beberapa anak mereka yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artikel ini berpendapat bahwa dukungan pemerintah berupa peningkatan sumber daya perempuan, bantuan sosial dan pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan keluarga pemulung perempuan di tengah fenomena double burden yang mereka alami.

ABSTRACT

Abstract This article explains the life of Indonesian female scavengers in facing the double burden phenomenon that occurs at the TPA Batu Layang. Departing from C. Wright Mills' theory, this article discusses how structural poverty can encourage the double burden phenomenon. The qualitative method of the phenomenological approach is used in this study. Seen from its history, female scavengers are refugees who migrated to Pontianak City and chose to work as scavengers due to the Madurese and Malay ethnic conflict in 1999. Low resources, high economic demands make it difficult for female scavengers to get a prosperous life so they decide to play a dual role. It was found that out of 12 female scavengers, only 5 scavengers received social assistance because there was no equal distribution of social assistance from the government, so they had not received their rights and justice. The scavengers' mindset regarding the importance of education has now begun to change with evidence that some of their children continue their education to a higher level of education. This article argues that government support in the form of increasing women's resources, social assistance and education has a significant impact on the welfare of female scavenger families amidst the double burden phenomenon they experience.

Informasi Artikel

Diterima : 04 Februari 2025

Disetujui : 06 Mei 2025

Kata kunci:

Kemiskinan struktural, Double burden, Pemulung perempuan

Article's Information

Received: 04 February 2025

Accepted: 06 May 2025

Keywords:

Structural poverty, Double burden, Women scavengers

Pendahuluan

Tuntutan dan kebutuhan hidup di era globalisasi memaksa setiap keluarga harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Dalam hal ini perempuan yang berstatus istri dan ibu dari anak harus menjalankan peran ganda yaitu tanggung jawab rumah tangga dan mencari nafkah (Dwiantini, 1995). Ketidaksetaraan gender yang dikenal sebagai beban ganda terjadi di kalangan perempuan. Menurut Kamus Keluarga

Berencana, hal ini berarti memperlakukan satu gender secara berbeda dengan menawarkan mereka lebih banyak pekerjaan. Lebih (beberapa) dibandingkan jenis kelamin lainnya. Implikasinya dalam hal ini adalah perempuan harus melakukan lebih banyak pekerjaan: pekerjaan rumah tangga, mengurus rumah tangga dan anak, mengurus suami, dan bekerja di luar rumah untuk menafkahi rumah tangga.

Menurut Pijati (1986), perempuan bekerja di luar rumah karena alasan ekonomi. Temuan lain menunjukkan bahwa perempuan sulit bekerja di luar rumah bukan hanya karena alasan ekonomi keluarga, namun juga beberapa motivasi lain seperti pengalaman dan keinginan bekerja di luar rumah. Partisipasi dalam perekonomian keluarga dan keinginan untuk mewujudkan diri (menurut Novari et al. (1991). Oleh karena itu, bukan hanya faktor ekonomi saja yang mendorong perempuan untuk bekerja hingga mempunyai pengalaman ganda.

Saat ini kemiskinan masih menjadi suatu Persoalan yang kompleks karena mempunyai berbagai macam aspek seperti hak untuk mendapatkan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pekerjaan serta pendidikan (Suhartono et al., 2014). Issu mengenai kemiskinan sudah mendunia dengan hadirnya kesepakatan MDGS (Millenium Development Goals) yang pada tahun 2015 diperbaharui menjadi kesepakatan SDGS (Sustainability Development Goals) yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai isu nomor satu dari tujuh belas isu yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Fenomena kemiskinan menjadi suatu pokok permasalahan di Indonesia khususnya di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2017 mencapai 5,31%, pada tahun 2018 mencapai 5,00%, pada tahun 2019 mencapai 4,88%, pada tahun 2020 mencapai 4,70% dan pada tahun 2021 mencapai 4,58 % (BPS Kota Pontianak, 2022).

Meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Barat sempat melandai, namun angka kemiskinan tersebut terbilang masih cukup tinggi di banding provinsi lainnya. Angka kemiskinan yang melandai tidak berarti jika belum memiliki arah yang sama sebagai bentuk pemerataan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini dibuktikan adanya kesenjangan pendapatan masyarakat (Fadillah, 2021). Kesenjangan Pendapatan masyarakat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Kemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat disebabkan karena adanya suatu sistem pada struktur sosial masyarakat miskin sendiri yang tidak bisa memperbaiki hidupnya dan hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang membuat mereka miskin dan termarginalkan (Ahmad, 2022). Budaya kemiskinan terdapat pada masyarakat pemulung yang berada di daerah perkotaan, budaya kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi (Wahyudi, 2014). Jurang antara masyarakat kaya dan miskin di Indonesia semakin melebar. Orang yang mempunyai kekayaan menguasai berbagai prasarana yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lemah. Mereka juga membayar kaum elit politik untuk mendukung usahanya yang seringkali menindas kaum miskin. Elite ekonomi dan politik saling mendukung dan membutuhkan umumnya mereka diperkuat dengan para elite intelektual dan teknokrat (Surayawasita, 1989). Kondisi perekonomian telah menentukan nasib para pekerja miskin dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial ekonomi mereka (Liu, 2020).

Dilihat dari realitas yang terjadi, kemiskinan yang dihadapi masyarakat miskin merupakan bentuk kemiskinan buatan manusia, dari manusia dan terhadap manusia. Kemiskinan itu disebut dengan kemiskinan struktural yang dihasilkan dari struktur baik bersifat politik, sosial, ekonomi ataupun kultural. Sebuah struktur yang tidak adil menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan, pendidikan, perumahan dan upah yang layak. Kemiskinan tidak dapat diubah dengan menyuruh mereka untuk bekerja lebih keras untuk mencari pendidikan dan keterampilan yang tinggi namun hanya dengan cara mengubah koordinat struktur yang menjadi batas golongan itu. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh struktur yang tidak adil harus dihapus karena kemiskinan dapat merongrong martabat manusia yang ditimpa kemiskinan. Kebutuhan dasar mereka sebagai manusia tidak terpenuhi dan secara total mereka tergantung dari kemauan orang dan golongan kaya lainnya (Magnis-Suseno 1983 : 341-342).

Padahal, dalam konstitusi Indonesia pengentasan kemiskinan menjadi suatu tujuan awal terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tercantum pada alinea ke-4 dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara”, selanjutnya dalam pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Ke-tiga pasal tersebut menggambarkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan kehidupan yang baik (B. Putri et al., 2023).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi Warga negara yaitu dengan mengantisipasi dan meminimalisir warga Negara yang berada dalam kemiskinan (Anbia, 2022). Keadilan sosial dalam negara Indonesia dapat terwujud melalui dua pihak, yang pertama adalah negara yang wajib mengusahakan keadilan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kedua adalah warga negara yang di dorong untuk ikut serta mengusahakan keadilan sosial. Sehingga keadilan sosial mengatur seluruh hubungan negara dan warga negara (Kirdi Dipoyudo, 1982). Negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan keadilan, namun kenyataannya keadilan sosial yang diusahakan negara tidak serta merta terwujud karena adanya campur tangan dari penguasa. Mereka menghambat perwujudan keadilan sosial dari pihak penguasa. Terkadang mereka menghambat perwujudan keadilan sosial karena dapat menanggu kepentingan mereka sehingga diharapkan adanya perjuangan dari pihak yang terkena ketidakadilan (Magnis-Suseno 1983: 335)

Kenyataan yang terjadi hingga saat ini kesejahteraan sepertinya belum dirasakan oleh seluruh warga negara terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan yaitu adanya tindakan korupsi yang marak dilakukan penguasa dan sangat merugikan negara dan masyarakat (R. D. Putri & Aimon, 2022). Korupsi telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan komitmen untuk mengamankan kepentingan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pemerintah hanya membajak aset negara demi keuntungan politik dan ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat menjadi apatis terhadap pemerintah, partai politik dan legislatif. Akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen aktor politik untuk memberantas korupsi dan kemiskinan menjadi berkurang (Tambunan, 2022)

Kemiskinan struktural yang terjadi dapat mendorong terjadinya Fenomena Double Burden yang merupakan fenomena Beban Ganda pada Perempuan. Beban ganda ini terjadi di ruang domestik dan publik yang memaksa Perempuan (Ibu) bekerja dengan berperan ganda dalam urusan domestik dan bekerja dalam waktu yang sama (Purnama & Andi, 2021). Kondisi inilah yang dialami oleh pemulung perempuan di TPA Batu Layang Kota Pontianak. Adapun data jumlah pemulung perempuan yang ada di sekitar TPA tersebut berjumlah 122 orang yang terdiri dari 64 orang Pemulung perempuan dan 58 orang Pemulung laki-laki. Pemulung perempuan di TPA Batu Layang mayoritas suku Madura. Sedangkan Di Indonesia yang menganut budaya patriarki, yaitu Hubungan antara laki-laki dan perempuan masih mengandung nilai patriarki yang mana laki-laki menempati komponen yang lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Oleh sebab itu dimensi sosial Madura memandang bahwa perempuan harus diawasi, dilindungi dan diarahkan. budaya Madura dalam pembagian gender dapat dilihat jelas dalam pembuatan batik yang dimana perempuan melukis kain sedangkan laki-laki membersihkan dan menempelkan lilin pada kain (Noer, 2012). Ada istilah dalam bahasa Madura, “reng binik pagghun pekerja ka dapur”. Yang mempunyai arti bahwa pada akhirnya seorang wanita pergi bekerja di dapur, istilah ini menjadi stereotipe yang melibatkan citra negatif perempuan Madura (Mufidah, 2017). Perempuan di ruang suci dan memisahkan mereka dari urusan laki-laki, ruang berarti bagian dari tradisi agama dan dialektika budaya

di masyarakat. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah produk dari konstruksi budaya dan nilai ideologi tertentu. Perkembangan perilaku manusia dan identitas individu lebih dipengaruhi oleh budaya sementara diferensiasi gender dipahami sebagai instrument dalam masyarakat pada waktu tertentu (Sudarso et al., 2019).

Latar belakang penelitian ini yakni adanya ketidakadilan gender pada pemulung perempuan yang disebabkan oleh kemiskinan yang distruktur oleh negara sehingga berdampak pada pemulung. Pemulung Perempuan TPA Batu layang ikut bekerja mencari nafkah karena ketidakmampuan mereka dalam memperbaiki hidup karena adanya Struktur sosial yang menimbulkan terjadinya Stratifikasi sosial pada masyarakat pemulung perempuan. selain itu kondisi tersebut diperparah dengan adanya keterbatasan sumber daya seperti pendidikan, ekonomi, akses dan pekerjaan yang membuat mereka semakin miskin serta termarginalkan. Di sisi lain, Peran ganda yang mereka lakukan bertentangan dengan budaya suku Madura yang kental dengan agama dan budaya patriarki. Hasil penelitian lain menemukan bahwa Faktor penyebab perempuan dalam Fenomena Double Burden (Beban Ganda) adalah jumlah tanggungan keluarga yang banyak, memanfaatkan ilmu yang sudah dimiliki, membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mempunyai anggota keluarga yang banyak dan mengisi waktu luang (Samsudin, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kehidupan pemulung perempuan dalam menghadapi fenomena double burden yang terjadi di TPA Batu layang, kota pontianak utara. Penelitian ini mengkaji relevansi kemiskinan struktural warga negara pada pemulung perempuan menggunakan teori C.Wright mills. Penelitian ini penting dilakukan karena membahas mengenai kehidupan pemulung perempuan yang sebenarnya, banyak orang yang menganggap bahwa pemulung termasuk golongan yang sangat miskin dan mendapatkan program khusus dari pemerintah. namun, faktanya sebagian besar pemulung perempuan masih mengalami kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur pemerintah mengenai kebijakan program kemiskinan yang tidak merata sehingga mendorong terjadinya ketidakadilan gender yang menimbulkan fenomena double burden atau peran ganda yang terjadi pada pemulung perempuan yang memaksa seorang perempuan atau ibu menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Metode

Pendekatan metodologi artikel ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi yang merupakan serangkaian penafsiran material, Metode ini mengonversikan dunia menjadi serangkaian representasi yang di dalamnya mencakup catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan catatan pribadi (John W. Creswell, 2013). pendekatan fenomenologi bukan sekedar praktik deskriptif, tetapi proses berkelanjutan untuk mengungkap dan mengintegrasikan kondisi konkret, institusi, dan asumsi bahwa struktur menjalani pengalaman, penyelidikan fenomenologis, dan pemikiran (Ferrari et al., 2018). Sedangkan Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini berisi deskripsi mengenai pemikiran dan pengalaman pemulung perempuan di tengah kemiskinan struktural dan fenomena double burden yang mereka hadapi hingga saat ini.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga April 2023. Adapun lokasi penelitian berada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Batu Layang, Kota Pontianak Utara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang Pemulung perempuan, dua di antaranya berstatus single parents. Sebagian besar pemulung perempuan merupakan masyarakat urbanisasi akibat konflik yang melanda di daerah mereka pada tahun 1999, namun ada juga dari daerah lainnya yang memiliki perekonomian rendah dan keterbatasan sumber daya. Saya memperoleh data primer dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam bersama pemulung perempuan yang berada di TPA dan mengadakan kunjungan ke tempat tinggal pemulung perempuan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengungkap detail tentang pengalaman dan perspektif orang yang diwawancarai tentang suatu subjek (Showkat, N., & Parveen,

2017). Selain itu, saya juga memperoleh data sekunder melalui berbagai sumber mengenai Kemiskinan struktural dan Fenomena Double Burden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini saya dapatkan melalui aktivitas penelitian dari hasil wawancara, catatan lapangan dan pencarian dokumen atau berita lain dari berbagai media yang membuat hasil penelitian bisa disusun dengan lengkap. Artikel ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisa data akan terus di lakukan hingga mendapatkan data jenuh. Kejenuhan data ditandai dengan tidak di dapatkan lagi data atau informasi baru (Huberman, M., & Miles, 2012) Dalam penelitian ini saya menggunakan langkah Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat yang berada di Kalimantan barat merupakan masyarakat majemuk dan memiliki banyak etnis. Cina, Dayak dan Melayu (Cidayu) adalah penduduk utama, namun ada juga be-beberapa etnis lain seperti Jawa dan Madura (Zakso, 2006). Kerusuhan yang terjadi antar suku Madura dan Melayu di Sambas tepatnya di kecamatan Pemangkat dilatarbelakangi oleh ter-sebarnya berita dari suku Melayu. Berita tersebut tersebar ke seluruh wilayah kecamatan Pemangkat. yaitu berita adanya penyerangan masyarakat suku Madura terhadap suku Melayu. Peristiwa tersebut menimbulkan banyak korban, terjadinya pembakaran rumah warga suku Madura, serta pengusiran terhadap suku Madura (Bestari et al., 2019). Konflik yang terjadi menimbulkan dampak yang serius bagi suku Madura. Mereka kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, mendapatkan stereotip negatif dari masyarakat Melayu di Pemangkat. Akhirnya Masyarakat Madura yang terdampak konflik melakukan migrasi ke seluruh wilayah Kalimantan barat untuk mencari kehidupan baru. Salah satunya di Kota Pontianak utara. Hingga saat ini, Stereotipe etnik sudah menyebar luas, Etnis Melayu disebut orang muslim, terpelajar, terurbanisasi dan memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan etnis Dayak Kristen pedesaan. Etnis Cina dianggap kaya, sementara Madura dianggap miskin, kasar, tidak terpelajar dan kuat dengan pemimpin agama mereka yang berasal dari Madura (Budaya et al., 2017). Keanekaragaman etnis tersebut biasanya berkelompok dalam satu wilayah tertentu, mereka berdomisili di sepanjang sungai, pinggiran dan sudut kota. (Tariku, 2015) mengungkapkan bahwa baginya, status sosial memiliki peran besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teori urbanisasi yang dinyatakan oleh Maine, Wirth dan Redfield dalam (Bruner, 1961) menyebutkan bahwa Urbanisasi sebenarnya tidak membuat masyarakat menjadi sekuler, seseorang tidak terasing secara individu, kelompok kekerabatan tidak akan hilang dan relasi sosial akan tetap terjaga. Mayoritas pemulung perempuan di TPA Batu Layang berasal dari Suku Madura, mereka hidup secara berkelompok di pemukiman di sekitar TPA. Para pemulung perempuan adalah bukti nyata dan menjadi korban dari konflik tersebut. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh ibu Mima seorang pemulung perempuan menjadi salah satu korban konflik dan melakukan urbanisasi ke Kota Pontianak.

“Saat kerusuhan terjadi, saya dan keluarga diusir dari Kota Pemangkat. kami tinggal di tempat pengungsian khusus suku Madura, saat tiga tahun di penampungan akhirnya suami dan kedua anak saya meninggal dunia disana. Jadi saya memutuskan untuk pergi Pontianak bersama keluarga dan langsung bekerja sebagai pemulung hingga saat ini. Disini juga mayoritas penduduknya suku Madura.” (Pemulung perempuan, 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa para perempuan melakukan pengungsian dan imigrasi karena adanya konflik dan stratifikasi sosial masyarakat sehingga membuat salah satu suku menjadi termarginalkan. Ravenstein mengungkapkan bahwa alasan ekonomi adalah faktor utama migrasi karena pada umumnya penduduk pindah dari wilayah miskin ke wilayah yang lebih kaya. Pada tahun 1885 Ravenstein menerbitkan makalah berjudul “The Laws of Migration” (Society 2013) dimana dia menyoroti

perbedaan antara mobilitas laki-laki dan perempuan, rata-rata perempuan bermigrasi lebih banyak daripada laki-laki. Menurut-nya, perempuan lebih cenderung mengunjungi daerah di dekat rumah mereka, terutama dengan tujuan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan bermigrasi ke daerah pemukiman dan pekerjaan (Gomez-gardenes et al. 2020). Selain suku Madura, Pemulung perempuan juga ada yang berasal dari daerah lain seperti Jawa timur dan Flores. Mereka datang merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mencari pengalaman kerja. Hal ini diungkapkan oleh ibu Lina seorang pemulung perempuan yang berasal dari Flores.

“Saya berasal dari ende flores, disini saya ikut bersama suami bekerja menjadi pemulung. Saya memulung karena di Flores tempat tinggal saya hanya ada pekerjaan menganyam tikar dan menenun saja dengan penghasilan yang tidak begitu besar. Saat ini kebutuhan sehari-hari banyak, harga jual kebutuhan naik. jika tidak mulung kita mau makan apa sementara pemasukan kurang. Jadi saya memutuskan untuk merantau di kota pontianak dan berharap mendapatkan penghasilan yang lebih. Selain memulung disini saya juga beternak ayam, babi dan anjing di pekarangan rumah” (Pemulung perempuan, 2023)

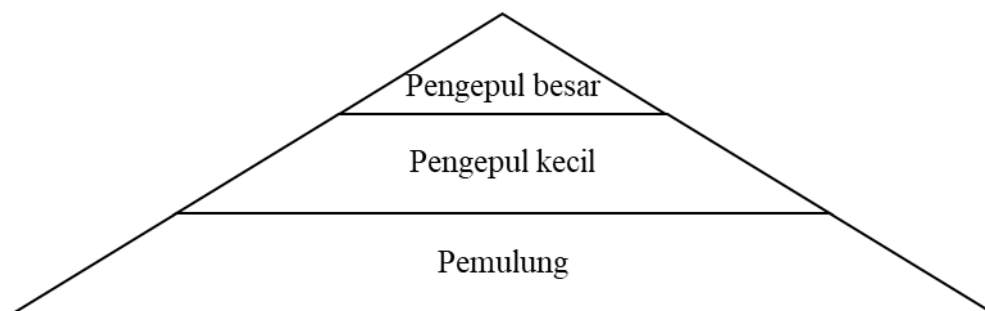
Dari ungkapan pemulung perempuan tersebut dapat kita ketahui selain suku madura, ternyata ada beberapa masyarakat dari daerah lain juga melakukan migrasi ke daerah yang menurut mereka mempunyai peluang atau lapangan pekerjaan dan mengikuti suami bekerja. Mereka juga melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan di daerah asalnya seperti beternak dan bertani. Dari kedua kegiatan tersebut mereka mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada umumnya para perempuan imigran terpaksa berpartisipasi untuk bekerja mencari penghasilan tambahan karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang memadai dari kota rantauan (Kumar et al., 2023).

Sikap mantap menerima keadaan ekonomi keluarga yang miskin dan membantu suami yang menanggung beban ganda ini didukung oleh fakta bahwa barang-barang bekas mudah ditemukan di daerah tersebut, termasuk di tempat pembuangan sampah dan di jalan umum. Barang bekas dapat diperoleh dengan modal seadanya, masyarakat yang berjalan kaki hanya menggunakan tenaga fisik, ada pula yang menggunakan angkutan umum seperti Oplets untuk sampai ke tempat tujuan atau mencari barang bekas, ada pula yang menggunakan sepeda untuk keperluan tersebut. Ini lebih komprehensif, Agar tidak menyulitkan pekerjaan, menggunakan alat yang sederhana saja seperti tas dan pengait bekas. Namun, dibalik hal tersebut terdapat kekhawatiran bagi para pemulung perempuan, terutama karena beberapa dari mereka sudah berusia lanjut.

Sebenarnya jika dilihat lebih luas, Kemiskinan terjadi disebabkan oleh banyak faktor, Robert Chambers menggunakan konsep kemiskinan terpadu untuk memahami kemiskinan. Ada lima unsur yang menjadi ruang lingkup masyarakat miskin dan perangkap miskin yaitu kemiskinan, fisik yang lemah, kerentanan, keterisolasi-an dan ketidakberdayaan (Subair, 2012). Pemulung dapat dikatakan sebagai sekelompok manusia yang memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari dan mengumpulkan barang-barang bekas yang sudah terbuang di tempat sampah sebagai “barang dagangan” (Berta & Rahayu, 2022). Selain itu modal sosial menjadi hal yang penting dalam struktur masyarakat pemulung perempuan karena adanya timbal balik antara pemulung dan pengepul dalam jual beli barang hasil pulungan. modal sosial yang dimaksud dapat mencakup beberapa faktor seperti partisipasi masyarakat lokal, hubungan dengan tetangga setempat, keluarga dan pekerjaan (Wang, 2023)

Struktur sosial pemulung perempuan umumnya mengacu pada struktur masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Batu Layang. Menurut para ahli Radcliffe-Brown struktur sosial merupakan suatu rangkaian sosial yang kompleks dan berwujud dalam suatu masyarakat. Struktur sosial juga terdapat hubungan sosial antar individu dan perbedaan individu, kelas sosial dan peran sosialnya dalam bermasyarakat. Hal tersebut terjadi pada Pemulung yang berada di TPA Batu Layang. Adapun struktur sosial pemulung perempuan dibedakan menjadi 3 dilihat dari penghasilan yang mereka dapatkan dan membentuk status sosial yang berbeda-beda yaitu pengepul besar, pengepul kecil dan pemulung.

Kedudukan pemulung perempuan berada di tingkatan paling bawah karena mempunyai penghasilan dan perekonomian yang paling rendah. Status sosial pemulung ini dapat dibedakan dari segi penghasilan yang didapatkan. Harga setiap barang bekas yang mereka peroleh berbeda beda. Adapun harga jual barang bekas yang akan dijual pemulung ke para pengepul sebagai berikut : Aqua gelas senilai Rp. 3.500/kg, Botol Rp. 2.700/kg, Plastik bekas perabotan Rp. 1.600/kg, Kardus Rp. 1000/kg, besi bekas Rp. 3000/kg dan Aluminium bekas Rp. 18.000/kg. Penghasilan pemulung perempuan dalam sepekan berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 300.000 saja. Sedangkan para pengepul kecil dan besar biasanya mendapatkan rata-rata penghasilan kotor sekitar Rp.5000.000 perbulan tergantung banyaknya barang.



Gambar 1
Struktur sosial pemulung

Ada banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan beberapa program untuk menunjang kehidupan masyarakat seperti program Indonesia pinta (PIP), melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta program lainnya untuk membantu masyarakat miskin (Vincentius Poluakan & Nurwati, 2019).

Humas Kelurahan batu layang menjelaskan mengenai Sistem atau cara kerja Program bantu-an sosial yaitu RT/RW mengumpulkan data masyarakat yang miskin, kemudian data tersebut di berikan kepada kelurahan. Setelah itu, Pihak kelurahan menyerahkan data tersebut ke Di-nas Sosial untuk diproses lebih lanjut oleh Kementrian Sosial. Untuk mendapatkan data masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial, saya mengecek langsung data mereka melalui website kementrian sosial yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Data diinput secara elektronik menggunakan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Cara ini merupakan salah satu sistem yang mempermudah masyarakat mengakses dengan memanfaatkan jaringan dan alat elektronik yang mendukung era digital biasanya disebut pa-perless yang berarti tidak menggunakan kertas sama sekali. Sehingga sangat penting sekali mencari strategi yang dilakukan agar dapat diterima tepat sasaran. Namun, seringkali ditemukan adanya penginputan data yang tidak padan ataupun tidak sesuai, faktanya masyarakat yang dikategorikan layak tidak terdata di DTKS sehingga bantuan tersebut men-jadi salah sasaran (Manoppo et al., 2022) Dari 12 orang pemulung perempuan hanya ada 5 orang saja yang mendapatkan Bantuan Sosial dari pemerintah baik itu berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan pendidikan anak masyarakat miskin (PIP) Masing-masing program tersebut terbukti dapat membantu perekonomian para pemulung perempuan. Namun, sayangnya bantuan sosial yang didistri-busikan masih belum merata diberikan kepada para pemulung yang termasuk kategori miskin. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang tidak update dalam menginput data masyarakat, Pihak Bidang Humas kelurahan batu layang menuturkan bahwa :

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pemerataan bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat. Pertama, mengenai Data dari Kementrian Sosial yang seringkali berubah misalnya ada data masyarakat yang tergolong miskin terdaftar, beberapa tahun kemudian kehidupannya sudah lebih baik ternyata masih saja terdaftar mendapatkan bantuan. Inilah yang menimbulkan suatu ketidakadilan padahal, seharusnya data mereka dihapus atau diganti dengan data masyarakat miskin lain yang membutuhkan. Kedua, kriteria yang diberikan untuk mendapatkan bantuan juga sulit diprediksi karena kemiskinan itu luas bisa dilihat dari segala arah. Ketiga, jangkauan yang jauh dan terbatas juga menjadi hambatan Petugas Dinas Sosial ada turun ke lapangan, namun sayangnya tidak semuanya petugas memonitor langsung ke lapangan. Keempat, Para RT/RW setempat seharusnya mendata masyarakatnya dengan baik sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada, jika hanya mementingkan keinginan sendiri atau memberikan bantuan untuk keluarga dekat saja maka hal tersebut tidak adil dan sangat berdampak pada masyarakat miskin yang sebenarnya lebih layak untuk mendapatkan.” (Humas kelurahan, 2023)

Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya pemerataan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. H.Suyatna Dosen Fisipol UGM mengatakan bahwa “Bantuan sosial yang salah sasaran ini diakibatkan karena kurangnya validasi dan verifikasi data kemiskinan. Data yang terpadu bahkan tidak terdata, pembaharuan data juga tidak dijalankan dengan baik”(Nurhadi 2021. nasional.tempo.co. Diakses pada 20 Mei 2023). Jika kita melihat dari kasus beberapa tahun lalu, Mantan Menteri sosial periode 2019-2024 Juliari Peter Batubara telah melakukan korupsi program pengadaan bantuan sosial Covid-19. Anggaran bansos tersebut berupa paket sembako dalam dua periode dan bernilai sekitar Rp.5,9 triliun. Korupsi ini dibantu juga oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dengan cara memotong uang setiap paket sembako rakyat senilai Rp. 10.000. adapun total dana yang dikorupsi sebesar Rp 32,48 miliar. Juliari Peter Batubara juga mendapatkan Rp. 15,1 Miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kabar terbaru KPK mengungkapkan saat ini ada dugaan terjadinya kasus korupsi pengadaan beras bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di kementerian sosial (kemensos) tidak hanya terjadi pada satu wilayah namun ruang lingkup kasus ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Yogi, 2023). Dari gambaran tersebut dapat kita lihat bahwa Kemiskinan juga disebabkan oleh struktural yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri seperti kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan dalam berkuasa, menganut sistem ekonomi yang hanya menguntungkan sekelompok saja, adanya korupsi, kolusi dan ketidakmerataan distribusi aset produksi (Asyifani et al., 2021).

Di kalangan elit, kemiskinan adalah tantangan besar selama demokratisasi. Para elite sebenarnya memahami secara sistematis bahwa kemiskinan adalah sebuah hasil sosial yang tidak diinginkan karena alasan politik, ekonomi dan moral. Mereka juga percaya secara konsisten selama bertahun-tahun bahwa negara adalah aktor yang harus bertindak dalam mengentaskan kemiskinan. Akibatnya mereka menganggap negara sebagai pemilik sarana untuk mencapai hasil sosial yang diinginkan (López, 2013).

Tidak meratanya bantuan sosial kepada rakyat miskin terutama pemulung perempuan membuat mereka merasa termarginalkan karena status sosial yang mereka miliki. Kemiskinan struktural tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tegak sendiri, bukan pula sesuatu yang dikatakan sebagai kuasa asal permasalahan sosial, namun kemiskinan struktural dianggapi sebagai akibat atau hasil dari makro sosiologis dalam masyarakat yang menjauhkan rakyat dari pemilikan dan pengendalian sumber daya, ekonomi, politik dan sosial. Pola kekuasaan yang menyebabkan Kemiskinan Struktural yang terjadi pada warga negara ini relevan dengan teori yang dicetuskan C. Wright Mills seorang sosiolog yang intens mengamati realita dan kekuasaan negara. Mills dalam teorinya menyatakan bahwa mereka yang berada di posisi Atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik membentuk elit penguasa yang terintegrasi dan terpadu karena keputusan penting mereka menentukan struktur masyarakat Amerika. Keputusan mereka secara tidak langsung digunakan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan daripada meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mills, 1956). Apabila kehidupan rakyat sejahtera, permasalahan kemiskinan pasti akan

terselesaikan. Keadilan pemerintah dalam memberikan bantuan juga sangat diharapkan para pemulung perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Lina sebagai berikut.

“Saya tidak tahu bagaimana pemerintah ini. Terkadang adil, terkadang tidak adil. tapi kita tidak perlu memaksa mereka untuk berlaku adil. Seharusnya mereka tahu sendiri bagaimana dengan keadaan rakyatnya. Setidaknya memberikan perhatian dan hak kepada masyarakat miskin dengan melakukan pemerataan bantuan sosial langsung turun ke lapangan”

Selain itu, ungkapan yang sama juga diucapkan Ibu Santi mengenai harapan untuk pemerintah, ia mengatakan bahwa :

“Semoga ada bantuan dari pemerintah. Semua orang mengharapkan bantuan. Sedangkan orang yang mampu saja diberikan bantuan, kenapa orang susah tidak diberikan ? kalau dilihat dari kondisi luar rumah, kami orang miskin memang terlihat layak namun, jika dilihat di dalam rumah, rumah kami biasa saja bahkan ada yang tidak layak dan tidak dapat membangun Wc sendiri di rumah. Dulu saya mendapat bantuan untuk membangun Wc dari sebuah instansi berjumlah Rp. 1.200.000, tapi uangnya dipotong Rp. 400.000, dikurangi lagi untuk upah yang mengurus Rp. 200.000. sehingga saya hanya mendapatkan sisanya Rp. 600.000 dan uang sejumlah itu tidak cukup untuk membangun Wc dirumah” (Pemulung perempuan, 2023).

Dalam buku *The Sociological Imagination* Mills juga mengungkapkan beberapa profesi pada dasarnya telah “terjual habis” dan mulai melayani tuan selain kebenaran (Mills, 1959). Mills berusaha memberikan pandangan untuk membedakan *Personal Trouble* (Masalah pribadi) dan *Public Issue* (Masalah Publik). Mills mengungkapkan tiga komponen yang mempengaruhi suatu kejadian sosial yang terjadi dan menghubungkan dengan pengalaman dirinya dalam masyarakat yaitu faktor sejarah, biografi dan struktur sosial. Bagi Mills, Birokrasi adalah suatu hal yang mencoba merasionalisasi segalanya, membuat bisnis dan orang-orang lebih efisien. Namun, efeknya justru hilangnya kebebasan. Alasan telah menjadi alat tirani daripada bantuan untuk kebebasan sehingga mengarah pada hilangnya individualitas yang akhirnya mengarah pada provokatif yang disebut oleh Mills sebagai *Kebangkitan Robot Ceria*. Mills menyebut masalah *Robot Ceria* ini dalam masalah individu dan sosial. Yaitu secara individu, masalahnya adalah keterasingan dalam bekerja, manusia terasing dari perasaan mereka yang sebenarnya tentang mereka sendiri. Adapun secara sosial, hilangnya masyarakat demokratis, Dalam masyarakat yang benar-benar demokratis, tiap orang berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak pada mereka. Namun, semakin banyak di masyarakat kita justru elit manajerial yang membuat keputusan (Mills, 1959). Akan tetapi hal tersebut belum bisa menanggulangi kemiskinan karena ada aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, politik, kelem-bagaan dan lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan dalam proses menanggulangi kemiskinan yang tidak hanya fokus pada individu akan tetapi juga segi struktural dalam masyarakat (Marcelino Vincentius et al., 2020).

Dimensi kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat kesempatan yang ada pada masyarakat berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri misalnya rendahnya pendidikan sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri. Kedua faktor tersebut mempengaruhi akses bagi seseorang berada dalam kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan (Fadilah, 2013). kemiskinan selalu mengiringi setiap langkah pembangunan perkotaan. Kelompok miskin ini biasanya saling berkumpul, mempunyai ikatan yang kuat saling membantu sama lain sehingga dengan cara apapun mereka mampu menempati tempat yang sempit dan segala aturan yang dibuat demi kelangsungan hidup mereka. Selain ketidakmampuan si miskin dalam mengakses sumber ekonomi, adanya pembatasan kesempatan untuk mengakses sumber ekonomi oleh kapitalisme membuat kondisi mereka semakin lemah. Kebijakan yang mementingkan industri dan mengabaikan kaum miskin. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka (Rusli et al., 2012).

Kesenjangan yang signifikan ditemukan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan demografi menunjukkan masalah kesejahteraan potensial lainnya, misalnya, ketimpangan pendapatan. Karena beberapa kelompok individu lebih berpendidikan, memiliki akses yang lebih baik ke layanan, atau diberkahi dengan lebih banyak aset, mereka mungkin merasa lebih mudah untuk meningkatkan penghidupan mereka (Sugiharti et al., 2022). Pada pemulung perempuan, faktor internal dari dalam diri seperti rendahnya pendidikan membuat mereka tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dari 12 orang pemulung perempuan yang kami wawancarai hanya 2 orang saja yang menempuh pendidikan dan hanya pernah duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), 10 orang lainnya tidak pernah menempuh pendidikan atau mendalami keahlian apapun. Keterbatasan pendidikan yang dimiliki pemulung perempuan secara tidak langsung ternyata sangat mempengaruhi pola pikir atau mindset dan berpengaruh pada anak-anak mereka mengenai pendidikan serta menurunkan sifat ketergantungan dan rendah diri cenderung mewariskan kemiskinan secara turun temurun.

Teori struktural fungsional yang dicetuskan oleh Emil Durkheim mengenai konsep tatanan sosial. Ia menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan biologis yang di dalamnya terdiri dari organ-organ, memiliki ketergantungan satu sama lain dan bertujuan agar organ dapat bertahan hidup. Menurut Durkheim, masyarakat diartikan sebagai keluarga yang membentuk kesatuan dimana didalamnya terdapat bagian sub sistem yang berbeda. Keseimbangan dalam keluarga akan tercipta apabila anggota keluarga dapat menjalankan fungsinya masing-masing (Nugroho, 2021). Durkheim juga mengatakan bahwa masyarakat merupakan realitas sui generis. Sui generis dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki eksistensinya sendiri, mempunyai fungsi yang berbeda untuk menciptakan sebuah kestabilan sehingga jika ada satu bagian yang tidak berfungsi maka akan mengakibatkan kerusakan sistem pada masyarakat itu (Supriadi et al., 2022). Sehingga Durkheim menyimpulkan bahwa “ras dan individualitas adalah dua kekuatan kontradiktif yang bervariasi secara terbalik antara satu sama lain” (Geider, 2022). Artinya dalam berkeluarga suami dan istri harus bekerja sama agar terciptanya keseimbangan dalam keluarga dengan cara menjalani peran masing-masing sesuai dengan fungsinya, laki-laki berperan mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Ketidakterfungsian keluarga menimbulkan kerusakan seperti ketidakadilan gender yang terjadi pada pemulung perempuan berbentuk Fenomena Double Burden atau Peran Ganda yang dimana salah satu gender dibebankan lebih dari gender lain. Artinya seorang perempuan memiliki beban yang lebih banyak daripada laki-laki.

Laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan objek dan subyek yang sama dalam pembangunan yang mana keduanya memiliki peranan yang sama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, akan tetapi yang menjadi pembeda nya hanyalah fisik saja yakni alat reproduksi, namun dalam kenyataannya perbedaan reproduksi seringkali membuat perempuan di pandang lebih rendah daripada laki-laki, digambarkan sebagai manusia cengeng, lemah tidak bisa mengambil keputusan (Zuhri & Amalia, 2022). sehingga perbedaan jenis kelamin berdampak pada peran dan fungsi sosial atau gender. Tanpa disadari hal tersebut menimbulkan sebuah perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, akibatnya perlakuan tersebut menguntungkan laki-laki daripada perempuan yang memicu ketidakadilan gender bagi perempuan berupa Fenomena Double burden. Beban Ganda (Double Burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Fenomena ini juga dikenal sebagai Pergeseran Kedua seperti dalam buku Arlie Hochschild seorang sosiolog yang meneliti tentang Gender, Pekerjaan dan Keluarga. Karya nya berjudul “The Second Shift” (Arlie Hochschild, 2003).

Dalam fenomena beban ganda ini, para pemulung perempuan berkumpul di Tempat Pembuangan Akhir siap dengan peralatan berupa karung dan gancu untuk mengais rupiah. Sebagian besar Pemulung perempuan biasanya pergi mulai melakukan pekerjaan memulung sekitar pukul 06.00 Pagi hingga pukul 13.00 siang. Selain itu, ada juga pemulung perempuan yang mulai bekerja pada malam hari sekitar pukul 23.00 malam hingga pukul 04.00 pagi. Sehingga rata-rata mereka bekerja menghabiskan waktu selama 6 sampai 12 jam perhari. Sebelum memulung mereka melakukan aktivitas domestik di dalam rumah dulu seperti memasak dan mempersiapkan perlengkapan sekolah anak setelah itu mereka langsung turun ke

gunungan sampah yang ada di TPA. Peran ganda perempuan meliputi dua hal yaitu work and care (Hervey, T., & Shaw, 1998) work dapat diartikan sebagai peran perempuan dalam bekerja, pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Sedangkan istilah care mengandung arti peran perempuan dalam posisi mengurus keturunannya dalam segi domestik. Dari pengertian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Peran ganda perempuan dapat diartikan sebagai adanya kepemilikan lebih dari dua peran yang dijalankan oleh perempuan dalam waktu yang bersamaan (Ginting et al., 2018). Setiap hari para pemulung perempuan mencari barang bekas plastik yang dapat di daur ulang seperti botol minuman, plastik wadah, kaleng, alumunium, besi tua dan lainnya. Barang yang telah terkumpul dijual ke pengepul dengan harga Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000 perminggu. Rata-rata penghasilan pemulung perempuan berkisar antara Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 per bulan tergantung banyaknya barang bekas dan lamanya mereka bekerja. Uang yang mereka peroleh setiap minggunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kontrakan, kebutuhan sekolah anak, listrik dan lainnya.

Untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan, ternyata para pemulung perempuan melakukan pekerjaan lain seperti menjual gorengan, mencari sayuran untuk dijual, membuat titipan kue dan mengambil upah membersihkan kebun. Adapun faktor yang menyebabkan para pemulung perempuan bekerja karena kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi.

Dapat dilihat bahwa Faktor ekonomi menjadi alasan utama pemulung perempuan melakukan pekerjaan tambahan. Dapat dilihat bahwa peran laki-laki perlahan mulai berubah karena tidak jarang seorang perempuan juga ikut bekerja, untuk membantu suami dalam meringankan beban keluarga (Othman, 2015). Menurut The State of the World's Children 2007, wanita umumnya bekerja lebih lama daripada pria terlepas dari apakah mereka tinggal di negara maju atau berkembang (UNICEF, 2007). Perempuan menghadapi tantangan ekstra menjadi perempuan dalam budaya patriarki. Tantangan utama terletak pada keengganan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman, tidak adanya pendanaan yang memadai, sikap sosial budaya negative yang tidak diinginkan dan prasangka maskulinitas.

Buku John Frederick Conway, *The Canadian Family in Crisis*, mengeksplorasi efek beban ganda berdasarkan gender. Dalam penelitian Conway, dia menemukan perbedaan fisik, emosional dan psikologis antara pria dan wanita yang menghadapi beban ganda di Kanada. Dalam studi ini ditemukan bahwa wanita yang membesarkan anak dan bekerja lebih rentan mengalami kecemasan dan banyak efek terkait stress lainnya daripada wanita yang hanya menghadapi salah satu dari dua beban ganda tersebut. (Conway, 2003). Hal ini terungkap dalam hasil wawancara dengan Ibu Lamma sebagai pemulung perempuan berikut:

"Saya mempunyai 3 anak dan suami saya bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan tidak tetap. Salah satu anak saya masih SMP dan bersekolah di pondok pesantren yang setiap bulan harus dikirim uang Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 perbulannya. belum lagi yang lainnya masih bersekolah. Sehingga saya berusaha untuk bekerja mencari penghasilan tambahan dengan membantu menjual gorengan di warung. Hasil berjualan tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya saya juga merasa kelelahan setiap hari karena setelah pulang harus bekerja lagi dan mengurus rumah tangga. tapi daripada saya dirumah saja lebih baik saya bekerja membantu meringankan beban suami. anak-anak biasanya saya biarkan saja bermain kemana mana terkadang saya bawa mereka ikut bekerja di warung." (Pemulung perempuan, 2023)

Konsep beban ganda dengan pasangan suami istri ini merupakan fenomena dunia di seluruh budaya dunia yang berbeda, wanita menghabiskan lebih banyak waktu total dalam bekerja daripada pria. Peran reproduksi perempuan dianggap peran yang statis dan permanen Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di ruang publik namun tidak diiringi dengan kurangnya peran di ruang domestik, akibatnya tanggung jawab besar berada di pundak perempuan dan mengalami beban yang berlipat ganda (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

2014). Di Jepang, setelah menikah mereka masih diharapkan menjadi istri dan ibu yang berbakti yang mencurahkan seluruh tenaga mereka untuk rumah tangga, bahkan setelah seharian bekerja (Sernau, 2006). Ibu tunggal biasanya memiliki tingkat pekerjaan dan tanggungan anak yang lebih tinggi di rumah, kurangnya sumber daya ekonomi dan tidak memiliki pasangan untuk berbagi beban ganda. Ibu tunggal sangat rentan terhadap kerentanan ekonomi karena mereka mungkin menghadapi diskriminasi pekerjaan. Keluarga dengan ibu tunggal cenderung berada di dekat garis kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan dua kali lebih tinggi dari laki-laki (Carol D. Ryff, 1996). Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Pemulung sebagai seorang single parents yang hidup tanpa suami :

“Suami saya meninggal di umur 48 tahun, sejak saat itu saya memutuskan banting tulang sendiri untuk menghidupi 5 anak saya. Sangat sulit menghidupi diri tanpa seorang suami karena harus mandiri mencari uang sendiri dan hidup kami serba kekurangan. Anak-anak tidak menyentuh bangku sekolah hingga selesai. Namun, karena usia saya sudah hampir sepuh dan sudah lelah, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja menjadi pemulung saja karena saya tidak bisa mengharapkan pemberian dari anak yang sudah berkeluarga tentu memiliki kebutuhan masing-masing.” (Pemulung perempuan, 2023)

Seiring berkembangnya zaman, seringkali ditemukan pembagian kerja yang meletakkan kedudukan suami menjadi nomor satu yang membanting tulang sebagai pencari nafkah (Khurin'In Ratnasari, 2018). Anggapan perempuan tidak memiliki akses menuju sektor publik seperti bekerja seperti ini tidak berlaku lagi untuk saat ini. Karena banyak hal yang menjadi alasan perempuan bekerja seperti ingin mandiri, memanfaatkan skill yang dimiliki, bahkan tuntutan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Perempuan tidak hanya berada dalam ruang lingkup domestik tetapi juga publik dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Panani, 2021). Strategi kebijakan yang dapat mendukung ekonomi yaitu dengan memberikan dukungan pendapatan untuk keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan dengan memberikan hak dan layanan keluarga khususnya ibu tunggal (Van Lancker et al., 2015).

Simpulan

Artikel ini menjelaskan mengenai fenomena double burden yang terjadi pada pemulung perempuan di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk Ketidakadilan gender berupa beban ganda yang mana salah satu gender menanggung beban yang lebih banyak. Fenomena ini disebabkan oleh kemiskinan struktural warga negara yang mereka alami. Berangkat dari teori yang dicetuskan oleh C. Wright Mills, artikel ini membahas mengenai keterkaitan antara struktur sosial mengenai kebijakan pemerintah dengan kemiskinan yang dialami pemulung perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemulung perempuan merupakan suku Madura. Mereka melakukan imigrasi ke Kota Pontianak utara dilatar belakangi oleh konflik etnis Madura dan Melayu yang terjadi di Kota Pontianak pada tahun 1999, Mereka memutuskan untuk tinggal di sekitar TPA Batu Layang dan memilih bekerja sebagai pemulung. Penghasilan yang mereka peroleh rata-rata Rp. 300.000 sampai Rp. 1000.000 per bulannya. Peran ganda yang dilakukan pemulung perempuan ternyata bertentangan dengan prinsip suku Madura yang mengedepankan agama dan budaya patriarki. Selain memulung dan mengurus rumah tangga, ada juga yang melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan seperti bertani, menjual sayur dan membantu berjualan di warung. Tingginya tuntutan ekonomi, banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat mereka terpaksa berperan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Selain itu, ternyata dari 12 orang pemulung yang saya wawancarai, hanya terdapat hanya 5 orang saja yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah seperti PKH, BPNPT dan lainnya yang disebabkan oleh sistem pendataan yang bermasalah. Hal tersebut membuktikan belum adanya pemerataan bantuan pemerintah yang diberikan untuk para pemulung perempuan dalam membantu perekonomian mereka. Mereka mengakui sebenarnya perekonomian mereka sudah cukup, namun mereka tetap membutuhkan perhatian dan hak mereka dari pemerintah agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Anggota keluarga para pemulung perempuan cenderung bekerja sebagai pemulung secara

turun temurun, akan tetapi saat ini pola pikir mereka mulai berubah mengenai kesadaran pentingnya pendidikan karena ada beberapa anak pemulung perempuan yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. Jadi, sepertinya hal tersebut merupakan salah satu langkah awal mereka untuk memutus rantai kemiskinan melalui generasi mereka. Selain itu, pihak TPA juga ingin mengubah stigma negatif masyarakat luar mengenai TPA yang identik dengan kumuh, bau dan kotor. Ketua TPA ingin melakukan inovasi untuk membuat Green Village yang membangun beberapa gunung sampah menjadi bukit hijau. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan dukungan untuk pemberdayaan atau pelatihan untuk para pemulung perempuan agar mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka seperti berkebun, membuat pupuk dari sampah dan lainnya melalui program Green Village yang di canangkan oleh TPA Batu Layang.

Referensi

- Ahmad, B. (2022). *Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan)*. 4(1), 1–17. <https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/copisusu/issue/view/24>
- Anbia, F. (2022). Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara). *JURNAL PETITUM*, 1(<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/issue/view/7>), 1–10. <https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/issue/view/7>
- Arlie Hochschild, A. M. (2003). *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. file:///C:/Users/USER/Documents/Arlie Hochschild, Anne Machung - The Second Shift-Penguin (Non-Classics) (2003).pdf
- Asyifani, K., Alauddin, M. A., Herlina, H., & Purnamasari, K. (2021). Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta). *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(1), 61–75. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>
- Berta, K. M., & Rahayu, M. J. (2022). Korelasi Konsep Home Based Enterprise Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Pemulung. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v3i2.61865>
- Bestari, B., Zakso, A., & Firmansyah, H. (2019). *Madura-Melayu Di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/viewFile/52301/75676592063>
- Bruner, E. M. (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra. *American Anthropologist*, 63(3), 508–521. <https://doi.org/10.1525/aa.1961.63.3.02a00040>
- Budaya, D. A. N., Pontianak, K., Heterogenity, P., Of, C., & City, P. (2017). Fragmentasi, Sejarah, Heterogenitas Penduduk, dan Budaya Kota Pontianak. *Patrawidya*, 283–293.
- C. Wright Mills, A. W. (1956). *The Power Elite*. Oxford University Press, USA.
- Carol D. Ryff. (1996). *The Parental Experience in Midlife* (M. M. S. Carol D. Ryff (ed.)). Britania Raya: University of Chicago Press. https://www.google.co.id/books/edition/The_Parental_Experience_in_Midlife/pZSKBP_fN-cC?hl=id&gbpv=0
- Conway, J. F. (2003). *The Canadian Family in Crisis*. James Lorimer & Company. <https://www.worldcat.org/title/canadian-family-in-crisis/oclc/456139480?referer=di&ht=edition>
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender* (B. S. Fatmawati (ed.)). Bumi Aksara.
- Fadilah, I. F. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Policy Strategy of Tackling Poverty in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 1–13.
- Fadillah, A. (2021). Marko Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Analisis Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Dan Indikator Makroekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia). *Ascarya Journal Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 186–203. <https://doi.org/10.53754/iscs>
- Ferrari, M., Fitzpatrick, D., McLay, S., Hayes, S., Rathe, K. J., & Zimmer, A. (2018). Editors' Introduction: Reflections on the First Issue. *Journal of Critical Phenomenology*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31608/pjcp.v1i1.1>
- Geider, M. (2022). *Suicide at the Intersection of Race and Gender* [Western Michigan University].

https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/5351

- Ginting, P. A., Keindahan, P., Lingkungan, K., & Wanita, P. G. (2018). *Implementasi Teori Maslow dan Peran Ganda Pekerja Wanita K3L Universitas Padajajaran*. 1, 220–233.
- Gomez-gardenes, H. B. J., Gonçalves, B., & Mangioni, G. (2020). *Complex Networks XI*.
- Hervey, T., & Shaw, J. (1998). Women, Work and Care: Women's Dual Role and Double Burden in Ec Sex Equality Law. *Journal of European Social Policy*, 1(8), 43–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/095892879800800103>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2012). *Understanding and Validity in Qualitative Research*. In *The Qualitative Researcher's Companion*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781412986274.n2>
- John W. Creswell, C. N. P. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. USA: Sage Publications, Inc.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). *Glosary Ketidakadilan Gender*.
- Khurin'In Ratnasari. (2018). Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi. *IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong*, 67–78.
- Kirdi Dipoyudo. (1982). *Keadilan sosial*. Rajawali.
http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show_detail&id=189765
- Kumar, A., Siscawati, M., & Anggriani, S. (2023). A mosaic of identities , opportunities , and challenges : How intersectionality shapes the experiences of female water , sanitation , and hygiene entrepreneurs in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 0(0), 1–28. <https://doi.org/10.1080/12259276.2023.2248807>
- Liu, J. (2020). Fortress besieged: The female working poor in the evolution of Chinese social closure. *Asian Journal of Women's Studies*, 26(3), 279–300. <https://doi.org/10.1080/12259276.2020.1814598>
- Magnis-Suseno, F. (1983). *Kuasa dan Moral*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=116313>
- Manoppo, E. V., Laoh, N. A., Pemerintahan, I., Negeri, D., Provinsi, P., & Utara, S. (2022). *Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara*. 4(April), 25–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>
- Marcelino Vincentius, P., Raharjo, S. T., & Nurwati, N. (2020). Strengths-Perspective Sebagai Penguatan Dalam Pengembangan Kebijakan Sosial Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(1), 63–75.
<https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1775>
- Mills, C. W. (1959). *The Sociological Imagination*. <https://www.amazon.com/Sociological-Imagination-C-Wright-Mills/dp/0195133730>
- Mufidah, C. (2017). Complexities in dealing with gender inequality: Muslim women and mosque-based social services in East Java Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 459–488.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.459-488>
- Noer, K. U. (2012). Land, Marriage and Social Exclusion: The Case of Madurese Exile Widow. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65(ICIBSoS), 180–185. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.108>
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194. <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>
- Nurhadi. (2021). *Pakar UGM Sebut Mentalitas Miskin Jadi Sebab Bansos Salah Sasaran*. Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1532161/pakar-ugm-sebut-mentalitas-miskin-jadi-sebab-bansos-salah-sasaran>
- Othman, M. B. (2015). Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(November 2015), 1043–1048.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.139>
- Panani, S. Y. P. (2021). Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta terhadap Peran Ganda Perempuan. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 290. <https://doi.org/10.22146/jf.51468>
- Pontianak, B. K. (2022). *Kota Pontianak Dalam Angka 2022*.
<https://pontianakkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/125ffb2696a0108f62d7d6f0/kota-pontianak-dalam-angka-2022.html>
- Purnama, S. R., & Andi, A. (Universitas N. M. (2021). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Tukang Cuci Mobil/Motor. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(2), 106–113.

- Putri, B., Cinintya, ; Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Fakir Miskin Saat Pandemi Covid-19, & Indonesia, D. I. (2023). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Fakir Miskin Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(6). <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>
- Putri, R. D., & Aimon, H. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pengguna Internet, Kemiskinan dan Korupsi di Negara ASEAN: Lower Middle Income. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i2.13317>
- Rusli, Z., Sahuri, C., & Mashur, D. (2012). Penerapan Social Entrepreneurship dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1–55.
- Samsudin, C. M. (2020). Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com*, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Sernau, S. (2006). *Worlds Apart: Social Inequalities in a Global Economy*. https://books.google.co.id/books/about/Worlds_Apart.html?id=rfPP6uFOSIsC&redir_esc=y
- Showkat, N., & Parveen, H. (2017). in-depth interview quadrant-I (e-Text). *Data Collection and Analysis. Indian Journal of Plastic Surgery*, 38(1), 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.4103/0970-0358.16487>
- Siregar, M. F. S., & Azmi, F. (2022). *The Phenomenon of Commercialization of Education in Indonesia*. 6, 48–68.
- Society, R. S., & Society, S. (2013). *The Laws of Migration Author (s): E . G . Ravenstein Source : Journal of the Statistical Society of London , Vol . 48 , No . 2 (Jun . , 1885) , pp . 167-235 Published by : Wiley for the Royal Statistical Society Stable URL : http://www.jstor.org/stable/. 48(2), 167–235*.
- Subair, N. (2012). Perangkap Kemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup Perempuan Miskin. *Universitas Makassar*.
- Sudarso, Keban, P. E., & Mas'udah, S. (2019). Gender, religion and patriarchy: The educational discrimination of coastal madurese women, East Java. *Journal of International Women's Studies*, 20(9), 1–12.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Jayanti, A. D. (2022). Poverty Dynamics in Indonesia: The Prevalence and Causes of Chronic Poverty. *Journal of Population and Social Studies*, 30, 423–447. <https://doi.org/10.25133/JPSSv302022.025>
- Suhartono, D., Kanto, S., & Mu, S. (2014). Kajian Tentang Makna , Penyebab , dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Kajian Fenomenologi Komunitas Pemulung di TPA Supit Urang Kota Malang). *Wacana*, 17(4), 234–245.
- Supriadi, S., Siswadi, I., & Rosdiansyah, I. (2022). Peran Ganda Istri Petani di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.181>
- Surayawasita, A. (1989). *Keadilan sosial*. Kanisius. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=317340>
- Tambunan, D. (2022). *Indonesia under threat : The danger of corruption to political legitimacy*. October. <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>
- Tariku, A. (2015). State Formation and Dispute Resolution Mechanism in Ethiopia: a Case of Wolaitta People. *European Scientific Journal August*, 11(23), 1857–7881. <https://core.ac.uk/download/pdf/236411701.pdf>
- UNICEF. (2007). *No Title UNICEF. 2007. The State of the World's Children. New York: United Nations Children's Fund*. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2007>
- Van Lancker, W., Ghysels, J., & Cantillon, B. (2015). The impact of child benefits on single mother poverty: Exploring the role of targeting in 15 European countries. *International Journal of Social Welfare*, 24(3), 210–222. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12140>
- Vincentius Poluakan, M., & Nurwati, N. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural Di Indonesia. *Sosio Informa*, 5(3), 177–188. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1773>
- Wahyudi, S. F. (2014). Budaya Kemiskinan Masyarakat Pemulung. *Paradigma*, 2(2). ejournal.unesa.ac.id
- Wang, C. J. (2023). An institutional ethnography analysis on skilled Chinese immigrant mothers' experiences in Canada. *Asian Journal of Women's Studies*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/12259276.2023.2240535>

- Yogi, E. (2023). *KPK Ungkap Korupsi Beras Bansos di Kemensos Tak Cuma Di Satu Wilayah*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6624396/kpk-ungkap-korupsi-beras-bansos-di-kemensos-tak-cuma-di-satu-wilayah>
- Zakso, A. (2006). *IDENTITAS KEETNISAN DAN RELASI ANTAR ETNIS SISWA DAERAH RAWAN KONFLIK : Studi Mengenai Lingkungan Keluarga Kontribusi Sekolah dan Teman Sebye Terhadap Pembentukan Dinamika Psikologis Identitas Keetnisan dan Relasi Antar Etnis Siswa sekolah Menengah Atas* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um0330v5i2p138-147>
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>